

ABSTRAK

Jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan. Jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang Pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif. 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dan solusi terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kepastian hukum terhadap notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif adalah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan tidak konsekuensi oleh sumber daya manusia pendukungnya Notaris dan Majelis Pengawas. Dalam pelaksanaannya seorang notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif, yang menjadikan hambatan dalam persoalan ini, yakni: a. Tidak bisa secara intensif memandu akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti, b. Tidak bisa melakukan koreksi bukti formil dan materiil terhadap akta-akta yang dibuat tetapi nama tetap dicantumkan notaris pengganti, c. Tidak bisa menjamin terhadap kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti, d. Tidak bisa/tidak mampu menggunakan waktu cuti yang baik. Solusi dalam mengatasi hambatan terhadap Notaris yang cuti karena dilantik menjadi anggota legislatif adalah mempertegas syarat pencalonan anggota legislatif, bukan hanya sekedar untuk tidak berpraktik (cuti) namun dengan pengunduran diri sebagai notaris atau PPAT dan melepaskan seluruh atribut.

Kata Kunci : Anggota Legislatif, Kepastian Hukum, Notaris

ABSTRACT

The position of Notary is essentially as a public official (private notary) who is assigned by the public authority to meet the needs of the community for evidence of certification that provides for legal certainty of civil law. So as long as the evidence equipment is still needed by the State legal system, the position of Notary will still be required for its existence in the midst of society. Based on history, a Notary is a State Official to carry out the duties of the State in service to the community for the sake of creating legal certainty as an official of an authentic deed in civil matters. The purpose of this study is 1) To analyze and explain the legal certainty of a notary who must be appointed as a member of the legislature. 2) To analyze and explain the obstacles and solutions to a notary who must be appointed as a member of the legislature. The method used by researchers is to discuss normative law and specifications in this study including descriptive analytics. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies. Based on the results of the research, legal certainty for a notary who is appointed as a legislative member is asked not to practice as a public accountant, advocate, notary, land deed-making official, and / or who can help providers of goods and services relating to state finance with other jobs that can lead to a conflict of interest with the duties, authorities and rights as a DPD member in accordance with statutory provisions. Normatively, the certainty of laws requires the availability of legislation supporting the implementation. Officially, legislation must be approved and approved by the supporting human resources, the Notary and the Supervisory Board. In the implementation of the notary license which is licensed as a member of the legislature, which makes challenges in this matter, namely: a. Cannot intensively guide the deeds made by the notary created, b. Not able to make corrections to formal and material evidence of the deeds that were made but still included in the notary, c. Cannot guarantee legal certainty of deeds made by notaries, d. Cannot / unable to use good leave time. The solution in overcoming the problem of a Notary licensed as a member of the legislature must reinforce the nomination requirements for legislative members, not only to focus on not practicing (leave) but with resignations such as notary or PPAT and attribute changes.

Keywords: Legislative Member, Legal Certainty, Notary